



PENETAPAN
Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Supangat Bin Sukardi, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 14 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ngadisari, Rt. 001 Rw. 004, Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon I;

Siti Aminah Binti Muhtadi, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 19 April 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ngadisari, Rt. 001 Rw. 004, Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2003 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, Nomor : 221/08/V/2003 tanggal 13 Mei 2003 ;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa pernikahan Para Pemohon, telah lahir antara lain seorang anak Laki-laki yang bernama Wahyu Adi Pratama bin Supangat yang lahir di Wonosobo pada tanggal 24 November 2004 (umur 17 tahun 11 bulan), sebagaimana Akta Kelahiran Nomor AL. 6800370294 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3307-LT-19122016-0060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 20 Desember 2016 ;

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama :

Nama lengkap : Wahyu Adi Pratama bin Supangat
Tempat Lahir : Wonosobo
Tanggal lahir : 24 November 2004 (umur 17 tahun 11 bulan)
Jenis Identitas : KTP
Nomor : 3307072411040008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Pabrik
Berkebutuhan Khusus : Ya / Tidak
Status : Belum kawin
Pendidikan : SD
Alamat : Ngadisari, Rt. 001 Rw. 004,

Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar,

Kabupaten Wonosobo.

Hendak menikah dengan seorang anak perempuan yang bernama :

Nama lengkap : Eka Kusniyatun binti Pani
Tempat Lahir : Wonosobo
Tanggal lahir : 20 Agustus 2003 (umur 19 tahun 2 bulan)
Jenis Identitas : KTP
Nomor : 3307066008030001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Berkebutuhan Khusus : Ya / Tidak
Status : Belum Kawin
Pendidikan : SMP
Alamat : Dusun Wonolobo, Rt. 002 Rw. 002,

Desa Wilayu, Kecamatan Selomerto,

Kabupaten Wonosobo.

4. Bahwa atas maksud tersebut, Para Pemohon sudah mengurus pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo, namun atas maksud pendaftaran pernikahan oleh Para Pemohon tersebut telah ditolak sebagaimana Surat Penolakan model N7 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo Nomor : 573/kua.11.07.11/PW.00/9/2022, dengan alasan calon Pengantin Laki-laki (anak Para Pemohon) belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-undang ;

5. Bahwa alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya, karena anak Para Pemohon tersebut telah saling kenal dengan seorang Perempuan yang bernama Eka Kusniyatun binti Pani, sebagai teman dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, keduanya diam-diam sering bertemu baik di luar maupun di rumah, tanpa sepengetahuan dan di luar pengawasan Para Pemohon karena kesibukan masing-masing, dan dengan kedekatannya tersebut, anak Para Pemohon telah menyampaikan kehendaknya ingin menikah dengan teman laki-lakinya tersebut karena merasa telah siap menjadi seorang suami
6. Bahwa awalnya Para Pemohon mencegahnya karena anak Para Pemohon yang belum cukup umur, namun setelah mengetahui hubungan antara anak Para Pemohon dengan teman perempuannya telah begitu dekat, bahkan saat ini teman perempuannya telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan dan telah dilangsungkan pernikahan siri pada tanggal 27 Juli 2022, untuk itu Para Pemohon tetap berkehendak menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Eka Kusniyatun binti Pani tersebut dan mengajukan Permohonan ini ;
7. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah Aqil Baligh, belum pernah menikah, namun telah mengerti tanggung-jawabnya sebagai seorang suami dan anak Para Pemohon juga telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Bahwa selain itu anak Para Pemohon telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Selomerto I, Kabupaten Wonosobo Nomor : 391/RJ/IX/2022 pada tanggal 28 September 2022 dan mengikuti konseling Pranikah di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Nomor :

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460/302/X/2022 pada tanggal 02 November 2022 dianggap belum memenuhi kriteria untuk menikah ;

9. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan selain karena belum cukup umur, dengan demikian Permohonan Para Pemohon ini cukup alasan untuk dikabulkan ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Agama Wonosobo memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Wahyu Adi Pratama bin Supangat, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Eka Kusniyatun binti Pani, untuk dinikahkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo ;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Wahyu Adi Pratama bin Supangat, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Eka Kusniyatun binti Pani di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat secara cukup agar Para Pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan hingga anak yang bernama Wahyu Adi Pratama bin Supangat mencapai batas minimal

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia perkawinan, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, kemudian dalam sidang terbuka untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, demikian juga calon mempelai laki-laki bersama keluarga telah meminang calon mempelai perempuan dan orang tua/wali calon mempelai perempuan menerima pinangan tersebut serta calon mempelai laki-laki siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Wahyu Adi Pratama bin Supangat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan Eka Kusniyatun binti Pani serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai perempuan bernama Pani bin Murja, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Wonolobo, Rt. 002 Rw. 002, Desa Wilayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo dan Kartilah binti Samiyono,

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Wonolobo, Rt. 002 Rw. 002, Desa Wilayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3307071403640007 tanggal 24-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3307075904730006 tanggal 24-09-2012 yang oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3307072912072899 tanggal 28-12-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44416/TP/2009 atas nama Eka Kusniyatun tanggal 10 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Pertama nomor DN-03/D-SMP/13/0904154 tanggal 05 Juni 2020 atas Eka Kusniyatun yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SMP N 02 Selomerto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor Nomor 3307-IT-1912206-0060 atas nama Wahyu Adi Pratama tanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-03/D-SD/13/0338461 atas nama Wahyu Adi Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala SD N02 Kalikajar Kecamatan Kalikajar, tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Hasil Konseling Nomor 460/302/X/2022 tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan Unit Pelayanan Informasi Terpadu Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 391/RJ/IX/2022 tanggal 28 September 2022 yang di keluarkan oleh Dokter PUSKESMAS Selomerto 1 yang mana bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Syarat dan Penolakan Pernikahan Nomor 573/Kua.11.07.11/PW.00/09/2022 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi :

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I Munawaroh binti Muhtadi, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Budan Siwaru, Rt. 004 Rw. 004, Kelurahan Pecekelan, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah adik ipar Pemohon I ;
- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa antara Wahyu Adi Pratama bin Supangat dengan Eka Kusniyatun binti Pani tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Wahyu Adi Pratama bin Supangat dengan Eka Kusniyatun binti Pani tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil 16 minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sanggup membimbing kedua calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama sama berkeinginan untuk menikahkan Wahyu Adi Pratama bin Supangat dengan Eka Kusniyatun binti Pani;
- Bahwa Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II Siti Mulyani binti Muhtadi, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Budan Siwaru, Rt. 004 Rw. 004, Kelurahan Pecekelan, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah adik ipar Pemohon I ;
- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa antara Wahyu Adi Pratama bin Supangat dengan Eka Kusniyatun binti Pani tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Wahyu Adi Pratama bin Supangat dengan Eka Kusniyatun binti Pani tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kusniyatun binti Pani tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil 16 minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sanggup membimbing kedua calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama sama berkeinginan untuk menikahkan Wahyu Adi Pratama bin Supangat dengan Eka Kusniyatun binti Pani;
- Bahwa Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan calon mempelai wanita sudah terbukti hamil ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan Para Pemohon adalah orang tua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan bahwa yang dimohonkan dispensasi kawin adalah betul betul anak Para Pemohon dan telah berumur 17 tahun 11 bulan;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar) atas nama calon mempelai laki-laki membuktikan bahwa ia telah menyelesaikan dan lulus SD;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai perempuan) membuktikan bahwa calon mempelai perempuan sudah berumur 19 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi ijazah calon mempelai perempuan) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Rekomendasi layanan konseling) merupakan bukti tentang Subjek telah menempuh layanan konseling;

Menimbang bahwa bukti P-9 surat asli keterangan Dokter Puskesmas, membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki telah melalui prosedur pemeriksaan puskesmas setempat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Fotokopi Formulir Penolakan dari Kantor Urusan Agama) merupakan bukti tentang perlu ada dispensasi dari Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon disamping telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P-10. Juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terbukti alat bukti surat Para Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P-10. dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai laki-laki baru berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah berumur 19 tahun lebih;
- Bahwa baik calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan para calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak calon mempelai tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa calon mempelai wanita/ perempuan sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil 16 minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa masing masing para orang tua calon mempelai siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga para calon mempelai apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi para calon mempelai dalam kehidupan sosial;
- Bahwa hubungan para calon mempelai sudah sedemikian erat;
- Bahwa Kepala Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara para calon mempelai tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh calon mempelai wanita adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya Surat Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan dan atau Surat Penolakan Kantor Urusan Agama calon mempelai belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan MA RI dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas, Hakim akan mempertimbang kan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi in casu bahwa kedua calon mempelai telah terjalin hubungan sedemikian rupa sifatnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus ke dalam dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"; maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya kepada calon mempelai akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Wahyu Adi Pratama bin Supangat) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Eka Kusniyatun binti Pani);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1444 H. Oleh Drs. Muh Mahfudz sebagai Hakim tunggal, dibantu Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hary Suwandi, S.H.I.

Drs. Muh. Mahfudz

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
PNBP Panggilan 2 P	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	345.000,00,-

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PA.Wsb